

**KECUKUPAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU**

***ADEQUACY OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE  
IN MEETING TEACHERS' NEEDS***

Sukhittadewi

Pendidikan Keagamaan Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Syailendra  
sukhittadewi@syailendra.ac.id

**Abstrak**

Peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan diantaranya adalah mengajar, mendidik, membimbing dan administrator. Kekurangan guru di sekolah sudah pasti akan berdampak pada mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan bantuan operasional sekolah dalam pemenuhan kebutuhan guru. Penelitian ini menggunakan metode *mixed method*, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknis pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa Pembayaran honorarium bulanan SD yang ada di Gugus Telomoyo Kecamatan Getasan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), realita yang diperoleh rerata gaji bulanan yang diterima GTT dan PTT masih belum bisa dikatakan layak. Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk selalu mempertimbangkan kecukupan Dana BOS di setiap sekolah, utamanya pada komponen pembiayaan honorer bulanan. Kurangnya guru PNS dan banyaknya guru tidak tetap mempengaruhi kecukupan bantuan operasional sekolah, selain itu keberadaan guru berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** Kecukupan, BOS, Mutu Pendidikan

**Abstract**

*The roles of teachers in improving the quality of education include teaching, educating, mentoring and administering. The shortage of teachers in a school will certainly have an impact on the quality of education. This study aims to analyze the adequacy of the school operational assistance in meeting the needs of teachers. This study uses a mixed method, the data used are primary and secondary data. Technical data collection uses interviews and documentation. From the data obtained, it shows that the monthly payment of primary school honoraria in Telomoyo Cluster Getasan District is in accordance with the implementation guidelines and technical guidelines, although in reality the average monthly salary obtained by the PTT and GTT still cannot be said to be feasible. It is hoped that this research can provide input for policy makers to always consider the adequacy of BOS Funds in each school, especially in the monthly payment financing component. The lack of government employees teachers and the number of non-permanent teachers influences the adequacy of the school operational assistance. Besides, the existence of teachers also influences the increasing quality of education.*

**Keywords:** Adequacy, BOS, Education Quality

## PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan jawaban atas kebutuhan dan tantangan jaman saat ini. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Hal itu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama yang kooperatif dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga program wajib belajar 9 tahun tidak hanya menjadi slogan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama warga Indonesia. Hal lain adalah perlu adanya kesadaran orang tua untuk ikut mensukseskan program pemerintah tersebut, ketika orang tua tidak memiliki kesadaran akan pendidikan putra-putri mereka, maka program pemerintah tidak akan berjalan dengan lancar.

Pasal 31 (2) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Sedangkan dalam Pasal 34 (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan: "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".

Wajib belajar yang kini sudah berjalan dan peran pemerintah sangat penting. Pemerintah memberikan Bantuan Operasional Siswa (BOS) kepada sekolah negeri maupun swasta pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/ kejuruan. Besar BOS untuk tiap jenjang berbeda, untuk BOS sekolah dasar mendapatkan anggaran Rp800.000/siswa/tahun. BOS untuk jenjang SMP Rp1.000.000/siswa/tahun, dan untuk BOS jenjang SMA/K Rp1.400.000/siswa/tahun. Tujuan adanya dana BOS sendiri untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasional sekolah, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Aturan jumlah minimal siswa setiap rombongan untuk SD adalah 20 siswa, SMP 20 siswa, SMA 20 siswa, dan SMK 15 siswa per rombongan belajar. Selain ada aturan minimal tiap rombel, ada pula aturan maksimal jumlah siswa tiap rombel. Untuk jenjang SD maksimal 32 siswa per kelas, jenjang SMP maksimal 36 siswa per kelas, dan SMA dan SMK maksimal siswa tiap rombel 32 siswa. Bagi sekolah yang memiliki siswa banyak, pastinya dalam penggunaan dana BOS lebih leluasa daripada sekolah yang memiliki siswa minim, karena banyak juga sekolah yang jumlah rombongan belajar kurang dari minimum. Akibatnya pihak sekolah tidak bisa mengelola BOS secara maksimal. Padahal sekolah yang minim siswa sekalipun tidak boleh memungut ataupun membebaskan biaya tambahan kepada siswa. Keterbatasan inilah yang dirasa berat bagi sekolah yang memiliki siswa minim dalam mengelola BOS.

Salah satu kendala dalam pengelolaan BOS adalah pada pembiayaan honorarium bulanan, yang mana ada batasan maksimal yang diperbolehkan untuk menjadi para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Di beberapa sekolah negeri, tidak

semua guru yang mengajar adalah PNS, masih banyak juga guru wiyata. Hal ini tentunya berdampak pada mutu pendidikan dan pengelolaan pembiayaan honorarium yang diambil dari dana BOS. Sekolah yang memiliki siswa banyak dan memiliki jumlah GTT dan PTT yang minim tentunya berbeda dengan sekolah yang memiliki siswa minim tetapi memiliki GTT dan PTT yang banyak. Pada kenyataannya, terkadang yang honor yang diterima guru wiyata tidak sebanding dengan tugas dan kewajiban yang harus diembannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis “Kecukupan Bantuan Operasional Sekolah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru”.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Gugus Telomoyo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode *Mixed Methods*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknis pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui tingkat kecukupan dana BOS sekolah untuk pembiayaan pendidikan pada SD Negeri di satu gugus Telomoyo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dengan mencari nilai tertinggi, terendah, rata-rata, dan prosentase: Data jumlah dana bantuan operasional sekolah per anak dan data hasil tingkat kecukupan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Kecukupan dana bantuan operasional sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi jumlah Dana BOS dapat memenuhi seluruh pengeluaran untuk biaya operasional, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan siswa dan kelayakan gaji GTT serta PTT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kecukupan merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan (Michael & Stephen, 2006: 187). Kecukupan dalam penelitian ini mengarah kepada pemenuhan kebutuhan guru yang ada di sekolah dasar. Kenyataan yang ada masih banyak SD yang kekurangan guru, sehingga harus ada guru wiyata ataupun GTT yang harus melengkapi kekurangan guru tersebut. Ketika sekolah belum memiliki kecukupan guru maka ini akan berdampak pada aktivitas pembelajaran, padahal peran guru di sekolah sangat esensial. Kecukupan guru akan berdampak pada mutu pendidikan di SD.

Beberapa peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah mengajar, mendidik, membimbing, dan administrator. Guru yang mengajar tentunya harus memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan pembelajaran, menguasai rangkaian kegiatan pembelajaran seperti bahan ajar, sumber belajar, pendekatan, metode, teknik, sarpras, penggunaan media dan sebagainya. Mendidik merupakan kegiatan guru dalam memberi contoh, tuntunan, petunjuk dan keteladanan yang dapat ditiru oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Maka tentunya guru harus menjadi figur yang baik bagi siswa. Sebagai pembimbing, guru memiliki peranan dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik. Tugas guru sebagai administrator, adalah menyangkut peranan guru dalam kaitannya tugas-tugas administrasi sekolah dalam arti luas, selain tugas pokok mendesain

rencana pembelajaran dan mengajar itu sendiri (Sardiman AM, 2004: 163), (Gulo, 2004: 13).

Jika setiap guru melaksanakan perannya dengan baik dan diiringi dengan sifat-sifat keteladanan yang mulia di sekolah maupun di masyarakat, maka hampir dipastikan guru seperti itu dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ada banyak pendapat mengenai kriteria mutu pendidikan, misalnya; Engkoswara (1986) melihat mutu pendidikan/keberhasilan pendidikan itu dari tiga sisi yaitu; prestasi, suasana, dan ekonomi. Sallis (1995) mengemukakan bahwa ada dua standar utama untuk mengukur mutu pendidikan yaitu; (1) standar hasil dan pelayanan, dan standar customer (Sudarwan Danim, 2003: 19). Indikator yang termasuk dalam standar hasil dan pelayanan adalah mencakup spesifikasi pengetahuan, ketetampilan, sikap yang diperoleh anak didik, dan hasil pendidikan itu dapat dimanfaatkan di masyarakat atau di dunia kerja, tingkat kesalahan sangat kecil, bekerja benar dari awal, dan benar untuk pekerjaan berikutnya.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program BOS SD dan SMP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM.

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS meliputi efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat. Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai berikut: pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium bulanan, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan pengelolaan sekolah, pembelian dan perawatan perangkat komputer dan biaya lainnya.

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Suharsimi Arikunto, 1993: 297). Evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.

Gugus Telomoyo merupakan bagian dari Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Gugus Telomoyo terdiri dari 4 Sekolah yaitu SD Negeri Nogosaren, SD Negeri Ngrawan, SD Negeri Tolokan, dan SD Negeri Wates 1. Jumlah siswa paling sedikit 73 yang berada di SD Negeri Wates 1 dan siswa terbanyak di SD Negeri Tolokan dengan jumlah 262 siswa. Jumlah siswa dari SD Negeri Ngrawan 152 siswa, dan jumlah siswa dari

SD Negeri Nogosaren sebanyak 122 siswa. Rata-rata siswa dari Gugus Telomoyo sebanyak 152 siswa. Jumlah total siswa dari gugus Telomoyo sebanyak 609 siswa.

Biaya pendidikan sekolah dasar negeri di gugus Telomoyo kecamatan Getasan terdiri dari BOS. BOS tahun 2016 disalurkan sebanyak 4 kali atau setiap triwulan. Besaran dana BOS yang diterima setiap siswa Rp800.000/siswa/tahun, sehingga tahapan dana yang diperoleh setiap siswa Rp200.000/siswa/triwulan. Hampir seluruh biaya operasional sekolah diambil dari dana BOS, pihak sekolah dasar saat ini sudah tidak lagi memungut biaya pendidikan bagi siswa. Bahkan di depan pagar sudah ada plang/spanduk yang mensosialisasikan bahwa SD Negeri tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis.

Setidaknya sekolah yang berhak mendapat BOS adalah sekolah yang memiliki jumlah siswa sebanyak 60 siswa, kecuali sekolah di daerah khusus dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa, maka akan mendapat alokasi bantuan sebanyak 60 siswa. Dalam penerimaan sekolah harus melewati beberapa tahapan alokasi/penyaluran dana BOS, dari pendataan di sekolah kemudian penetapan alokasi tiap provinsi selanjutnya penetapan alokasi tiap sekolah dan pada tahap akhir adalah dasar penetapan alokasi sementara.

Bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa yang bekisar 60 siswa dengan sekolah yang memiliki jumlah siswa lebih dari 100 tentunya berbeda dalam pengelolaannya sehingga kecukupan tiap sekolah pun berbeda. Saat ini ada sebelas (11) komponen pembiayaan yang boleh dicukupi BOS, salah satunya adalah komponen pembiayaan honorer bulanan. Ada batasan maksimal pembiayaan honorer bulanan, yaitu 15% dari dana BOS yang diterima. Tentunya pengelolaan pembiayaan Sekolah yang memiliki siswa minimal akan mengelola sedemikian mungkin untuk dapat mencukupi kebutuhan sekolah. Sedangkan sekolah dengan jumlah siswa yang relatif banyak akan lebih leluasa dalam penggunaan dana BOS. Sebagai contoh, siswa kelas 2 yang ada di SD Negeri Wates 1 berjumlah 7 siswa dan jumlah siswa kelas 2 di SD Negeri Ngrawan sebanyak 33 siswa memiliki pengeluaran yang sama dalam kegiatan pembelajaran, baik di SD Negeri Wates dan SD Negeri Ngrawan memiliki kebutuhan untuk membeli kapur, kebutuhan untuk membeli penghapus, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua SD Negeri tersebut memiliki kebutuhan pelengkap dengan jumlah yang sama tetapi diterapkan kepada siswa yang jumlahnya jauh berbeda.

Total penerimaan bantuan operasional sekolah dasar negeri di Gugus Telomoyo Kecamatan Getasan sebesar Rp487.200.000, rata-rata bantuan operasional SD Negeri di Gugus Telomoyo Kecamatan Getasan sebesar Rp121.600.000. Bantuan operasional sekolah tertinggi sebesar Rp209.600.000 yang berada di SD Negeri Tolokan, bantuan operasional sekolah terendah adalah SD Negeri Wates dengan jumlah Rp58.400.000. Data penerimaan total dana BOS dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Penerimaan Dana BOS

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Dana BOS
1.	SD Negeri Wates	73	Rp58.400.000
2.	SD Negeri Tolokan	262	Rp209.600.000
3.	SD Negeri Ngrawan	152	Rp121.600.000
4.	SD Negeri	122	Rp97.600.000

Nogosaren		
Min	73	Rp58.400.000
Max	263	Rp209.600.000
Rata-rata	152	Rp121.600.000
Jumlah	609	Rp487.200.000

Tabel 2. Indikator Kecukupan

Nama Sekolah	Perolehan BOS	Indikator Kecukupan Dana BOS		Kategori Kecukupan
		Range Dana BOS	Kategori	
SD Negeri Wates	Rp58.400.000	Lebih dari Rp153.833.940	Sangat Cukup	Sangat kurang cukup
SD Negeri Tolokan	Rp209.600.000	Rp137.816.970 s/d Rp153.833.940	Lebih dari Cukup	Lebih dari cukup
SD Negeri Ngrawan	Rp121.600.000	Rp89.766.060 s/d Rp137.816.970	Cukup	Cukup
SD Negeri Nogosaren	Rp97.600.000	Kurang dari Rp89.766.060	Sangat Kurang Cukup	Cukup

Kecukupan Dana BOS di Gugus Telomoyo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Maksud kecukupan dalam penelitian ini adalah kondisi jumlah Dana BOS dapat memenuhi seluruh kondisi pengeluaran untuk biaya operasional, utamanya dalam pembiayaan GTT) dan PTT yang dapat diukur dari presentase maksimal dana bantuan operasional sekolah. Dengan demikian jika pembayaran honorarium bulanan diambil angka maksimal sebesar 15% dari jumlah GTT dan PTT yang ada di setiap sekolah, maka akan diperoleh data pada tabel 3.

Tabel 3. Pembayaran Honorarium Bulanan

No.	Nama SD	Jumlah GTT PTT	Pembayaran Honorarium Bulanan (Jika maksimal 15%)	Rerata pembayaran honorarium bulanan	Rerata penerimaan/bulan/orang
1.	SDN Wates	6	Rp8.760.000	Rp730.000	Rp121.667
2.	SDN Tolokan	13	Rp31.440.000	Rp2.620.000	Rp201.538
3.	SDN Ngrawan	5	Rp18.240.000	Rp1.520.000	Rp304.000
4.	SDN Nogosaren	5	Rp14.640.000	Rp1.220.000	Rp244.000
	Jumlah	29	Rp73.080.000	Rp6.090.000	Rp992.872
	Min	5	Rp8.760.000	Rp730.000	Rp121.667
	Max	13	Rp31.440.000	Rp2.620.000	Rp304.000
	Rata-rata	7	Rp18.270.000	Rp1.522.500	Rp248.218

Berdasarkan tabel 3 jumlah GTT PTT keseluruhan di gugus Telomoyo berjumlah 29 orang yang terdiri dari guru, penjaga sekolah, dan pegawai perpustakaan. Dari sembilan puluh delapan orang tersebut digaji dengan anggaran BOS yang ada. Komponen Pembiayaan dibidang pembayaran honorarium bulanan yang tercantum pada juklis BOS maksimal harus 15%, sehingga dari setiap sekolah akan mengelola komponen pembayaran honorarium bulanan sesuai dengan ketentuan yang ada pada petunjuk BOS. Jumlah alokasi

anggaran pembayaran honorarium bulanan dari gugus Telomoyo jika diambil angka maksimal 15% dari Dana BOS maka total keseluruhan adalah Rp73.080.000. Jumlah Rata-rata pembayaran honorarium dari keempat sekolah tersebut Rp6.090.000 dan jumlah rerata penerimaan/bulan/orang Rp992.872. Pembayaran honorarium bulanan yang paling tinggi Rp31.440.000/tahun, Rerata pembayaran honorarium bulanan Rp2.620.000 dan jika dibagi jumlah GTT dan PTT yang terdapat pada SD Negeri Tolokan. Sedangkan Pembayaran honorarium bulanan yang paling rendah Rp8.760.000/tahun. Rerata pembayaran honorarium bulanan Rp730.000 dan jika dibagi jumlah GTT dan PTT sebanyak 6 orang didapat Rp121.667/orang yang terdapat pada SD Negeri Wates. Namun jika dilihat dari rerata penerimaan tiap orang yang tertinggi adalah SD Negeri Ngrawan dengan penerimaan rerata gaji bulanan Rp304.000.

Dari data yang diperoleh, tentunya menunjukkan bahwa Pembayaran honorarium bulanan SD yang ada di Gugus Telomoyo Kecamatan Getasan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), walaupun realita yang diperoleh rerata gaji bulanan yang diterima GTT dan PTT masih belum bisa dikatakan layak. Jika dilihat dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Semarang, honorer yang diterima GTT PTT gugus Telomoyo masih jauh dari standar saat ini. Saat ini UMR Kabupaten Semarang tahun 2017 adalah Rp1.745.000, sedangkan tahun sebelumnya Rp1.610.000. Jika diambil rerata honor yang diterima GTT dan PTT tahun 2017 hanya 14,22% dari UMR Kabupaten Semarang.

## **PENUTUP**

Dari analisis data di atas, menunjukkan bahwa masih banyak guru di SD Negeri gugus Telomoyo berstatus sebagai GTT. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan guru belum maksimal. Kenyataan yang ada sekolah yang memiliki siswa yang banyak (lebih dari 100 siswa) tentunya BOS yang diterima dirasa sudah mencukupi kebutuhan operasional, namun bagi siswa yang memiliki jumlah siswa yang minim merasa bahwa Dana BOS yang diterima belum mencukupi kebutuhan sekolah. Belum lagi ditambah dengan banyaknya jumlah guru dan pegawai tidak tetap, tentunya komponen pembiayaan gaji guru dan pegawai tidak tetap akan pada batasan maksimal (15%). Padahal, batasan maksimal komponen pembiayaan honorer itu jika benar dikalkulasikan belum bisa dikatakan layak untuk gaji guru, apalagi melihat tugas dan kewajiban guru saat ini.

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi para pengambil kebijakazn untuk selalu mempertimbangkan kecukupan Dana BOS di setiap sekolah, utamanya pada komponen pembiayaan honorer bulanan. Setidaknya sekolah dasar negeri yang memiliki jumlah siswa sedikit juga memiliki guru honorer yang sedikit pula, yang mana guru PNS diperbanyak, sehingga kecukupan dana BOS dalam pemenuhan guru juga terpenuhi.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Engkoswara. (1986). *Kecenderungan Kehidupan di Indonesia Menjelang Tahun 200 dan Implikasinya Terhadap Sistem Pendidikan*. Jakarta: CV. Intermedia.
- Gulo, W. (2004). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta: Erlangga.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31.

Sardiman, AM. (2004). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarwan Danim. (2003). *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharsimi Arikunto. (1993). *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan Nasional dan Penjelasannya*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.

Wijayanti, Wiwik dan Sutapa Mada. (2015). *Penataan dan Pemerataan Guru: Analisis Kebutuhan, Ketersediaan, dan Kecukupan Guru di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah*. FIP UNY. Teknodika. Volume 1.